

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Modal Sosial

Konsep modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, diperlukan adanya kebersamaan dan kerja sama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut (Syahra *dalam* Fathy, 2019). Modal sosial bukan semata-mata dilihat sebagai sebuah hasil melainkan lebih kepada proses yang mengalami pembentukan secara terus-menerus dan senantiasa mengakumulasi dirinya. Berbeda dengan bentuk modalitas lain, modal sosial tidak akan pernah habis ketika dipakai bahkan kualitas modal sosial justru akan semakin baik apabila sering dimanfaatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa faktor umum yang mempengaruhi pembentukan modal adalah kebiasaan, kedudukan (peranan aktor), pendidikan, kelas sosial ekonomi dan nilai-nilai personal.

Modal sosial didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan norma informal yang dibagikan kepada anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan kerja sama di antara mereka (Magson dkk, 2014). Modal sosial didefinisikan sebagai aspek-aspek struktur hubungan individu yang memungkinkan mereka untuk menciptakan nilai-nilai baru (Ma'ruf, 2017). Modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan (Putnam *dalam* Kusuma, 2017). Modal sosial merupakan aspek hubungan sosial yang tumbuh dalam suatu kelompok sosial dan memungkinkan terwujudnya kerja sama dan koordinasi sehingga dapat menciptakan nilai baru serta mengakomodasi tindakan kolaboratif yang bermanfaat bagi kelompok sosial tersebut (Coleman *dalam* Riyanti, 2020).

Berdasarkan bentuknya modal sosial dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu (1) sebagai pengikat (*bonds*) atau tautan kepada setiap orang berdasarkan rasa identitas bersama seperti keluarga, teman dekat, dan orang yang memiliki latar belakang yang sama, (2) sebagai penyambung (*bridges*) atau tautan yang melampaui rasa identitas bersama misalnya kolega dan rekan yang jauh, dan (3)

sebagai pengait (*linkages*) atau tautan kepada seseorang atau kelompok yang lebih jauh atau lebih rendah dari kelas sosialnya (Keeley dalam Riyanti, 2020). Lebih lanjut, Abdullah (2013) mengemukakan tiga tipologi modal sosial yang meliputi pengikat/perekat (*bonding social capital*), penyambung/menjembatani (*bridging social capital*), dan pengait/koneksi (*linking social capital*).

a. *Bonding Social Capital*

Modal sosial pengikat menjadi bentuk modal sosial yang mengacu pada jaringan yang berorientasi ke dalam kelompok. Modal sosial pengikat adalah jenis modal sosial yang menggambarkan koneksi dalam suatu kelompok atau komunitas yang ditandai dengan tingkat kesamaan yang tinggi dalam karakteristik demografis, sikap, dan informasi serta sumber daya yang tersedia (Claridge, 2018).

b. *Bridging Social Capital*

Modal sosial yang menjembatani merupakan bentuk modal sosial yang mengacu pada jaringan yang dibentuk di luar kelompok. Modal sosial yang menjembatani adalah jenis modal sosial yang menggambarkan koneksi yang menghubungkan orang-orang lintas latar belakang yang merupakan kelompok masyarakat seperti ras, kelas atau agama (Claridge, 2018). Modal sosial menjembatani mengacu pada beragam jaringan dan hubungan antar kelompok (Parlinah dkk, 2018).

c. *Linking Social Capital*

Modal sosial menghubungkan merupakan bentuk modal sosial tertinggi karena menghubungkan berbagai kelompok yang heterogen secara hierarki. Modal sosial menghubungkan adalah jenis modal sosial yang menggambarkan norma-norma dan jaringan hubungan saling percaya antara orang-orang yang berinteraksi melintasi gradien kekuasaan atau otoritas yang eksplisit, formal atau dilembagakan dalam masyarakat. Hubungan ini digambarkan sebagai “vertikal” dan fitur utamanya adalah perbedaan posisi sosial atau kekuasaan (Szreter dan Woolcock dalam Riyanti, 2020).

Modal sosial tidak akan terpisah dari tiga elemen utamanya, yaitu kepercayaan (kejujuran, keadilan, sikap egaliter, toleransi, dan kedermawaan), jejaring sosial (partisipasi, timbal balik, solidaritas, dan kerja sama), dan norma

sosial (nilai bersama, norma dan sanksi, dan aturan) (Ma'ruf, 2017). Wuysang (2014) mengemukakan bahwa modal sosial pada intinya adalah serangkaian nilai dan norma yang merupakan wujud nyata dari suatu institusi yang bersifat dinamis. Wujud nyata dari modal sosial pada kelompok tani diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, jaringan sosial, tanggung jawab, norma sosial dan kerja sama. Dampak positif dari adanya modal sosial khususnya bagi petani adalah ketersediaan informasi dengan biaya yang murah, adanya fasilitas pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, dan berkurangnya perilaku oportunistik dari anggota kelompok.

2. Elemen-Elemen Modal Sosial

a. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam *dalam* Fathy, 2019). Fukuyama (2015) menjelaskan kepercayaan merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat yang menghasilkan persatuan dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Kepercayaan adalah sesuatu yang dipertukarkan dengan berlandaskan norma-norma bersama demi kepentingan orang banyak. Kepercayaan menyangkut hubungan timbal balik dimana bila masing-masing pihak memiliki harapan yang sama, maka tingkat kepercayaan yang tinggi akan terwujud.

Pretty dan Ward *dalam* Fathy (2019) mengemukakan bahwa terdapat dua macam kepercayaan dalam masyarakat, yakni kepercayaan terhadap individu yang kita mengenalnya dan kepercayaan terhadap orang yang tidak dikenal, namun akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktur sosial. Saling percaya terhadap satu sama lain dalam sebuah komunitas menghasilkan kemungkinan yang tinggi terhadap tingkat partisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Kepercayaan akan menimbulkan kewajiban sosial, dimana dengan mempercayai

seseorang akan menimbulkan kepercayaan kembali dari orang tersebut (resiprositas). Hubungan-hubungan yang dilandasi oleh prinsip resiprositas dan pertukaran akan dibayar kembali (*repair and balanced*). Hal ini merupakan pelicin dari suatu hubungan kerja sama yang telah dibangun agar tetap konsisten dan berkesinambungan.

Kepercayaan menjadi unsur terpenting dalam modal sosial yang merupakan tali pengikat antara satu sama lain sehingga tercipta suatu dukungan yang solid dan tahan lama. *Trust* adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, dan kepentingan anggota yang lain dari komunikasi itu (Fukuyama, 2015).

Elemen modal sosial yang menjadi pusat kajian Fukuyama *dalam* Fathy (2019) adalah kepercayaan (*trust*) karena menurutnya erat kaitannya antara modal sosial dengan kepercayaan. Suatu kelompok yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Perkembangan ekonomi yang dialami oleh Asia Timur yang begitu cepat, terutama dikarenakan pembentukan jaringan rasa percaya yang dibangun melampaui batas-batas keluarga, suku, negara dan agama.

Coleman *dalam* Fathy (2019) menegaskan bahwa “kelangsungan setiap transaksi sosial ditentukan adanya dan terjaganya *trust* (amanah dan kepercayaan) dari pihak-pihak yang terlibat”. Artinya hubungan transaksi antara manusia sebagai individu maupun kelompok baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, hanya mungkin terjadi dan berkelanjutan apabila ada *trust* atau rasa saling percaya dari pihak-pihak yang melakukan interaksi. Individu-individu yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, memungkinkan terciptanya organisasi-organisasi bisnis (dagang) yang fleksibel yang mampu bersaing dalam ekonomi global.

b. Norma Sosial

Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh

sekelompok orang (komunitas). Norma dapat bersumber dari agama, panduan moral maupun standar-standar sekuler serta halnya kode etik professional. Demikian pula dengan adat istiadat adalah tata kelakuan atau kebiasaan yang selalu ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Adat istiadat juga akan menjadi penuntun serta tata krama bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya. Didalam anggota kelompok tani sesuai dengan budaya dan adat masyarakat di Minahasa khususnya di Desa Tincep, maka berlaku adat istiadat yang diwariskan sejak dahulu kala seperti budaya Mapalus, yang saat ini tetap dan masih dilestarikan didalam kelompok tani itu sendiri. Budaya Mapalus adalah merupakan warisan budaya masyarakat Minahasa serta adat istiadat yang masih diyakini oleh setiap anggota kelompok tani. Hasil pengkajian Wuysang (2014) menunjukkan bahwa 86,67 % kelompok tani menganggap Norma sosial dianggap sangat penting dalam pembentukan modal sosial.

Norma sosial menciptakan kepercayaan sosial mengurangi biaya transaksi dan kemudahan bekerjasama. Karakteristik yang paling penting dari norma-norma timbal-balik. Dalam hal ini, timbal-balik dapat menjadi seimbang/spesifik atau umum. Timbal-balik yang seimbang menunjukkan pertukaraan barang dan nilai yang sama. Dalam kasus umum timbal-balik, ketidak seimbangan hubungan pertukaraan yang berkelanjutan berlaku disetiap saat. Nilai dan norma merupakan konstruksi (susunan) imajinasi, artinya konstruksi yang hanya ada karena dibayangkan didalam pikiran-pikiran dan banyak dipengaruhi oleh daya kreatif mental. Nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama didalam kehidupan sosial adalah konsep-konsep umum tentang sesuatu yang dicita-citakan, diinginkan, atau dianggap baik. Adapun norma merupakan penjabaran nilai-nilai secara rinci ke dalam bentuk pola-pola kehidupan sosial yang berisi perintah, anjuran, dan larangan yang diuraikan baik dalam bentuk tata aturan yang bernilai formal maupun nonformal (Dwiningrum, 2014).

c. Jaringan Sosial

Jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan antara individu dan komunitas. Keterkaitan terwujud didalam beragam tipe kelompok pada

tingkat lokal maupun ditingkat yang lebih tinggi. Jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Apalagi jika kelompok sosial itu mampu menciptakan hubungan yang akrab antara sesamanya. Oleh karena itu menurut Putnam *dalam* Wuysang (2014) bahwa jaringan sosial dapat dianggap penting dalam pembentukan modal sosial. Hasil pengkajian Wuysang (2014) menunjukkan bahwa sekitar 66,67 % kelompok tani menganggap bahwa jaringan sosial sangat penting dalam pembentukan modal sosial.

Parasmo dan Utami (2017) menjelaskan bahwa jaringan dapat disebut sebagai:

- 1) ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak,
- 2) kerja antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama,
- 3) seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar simpul itu pasti kuat menahan beban bersama
- 4) dalam kerja jaring tersebut terdapat ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Jika satu simpul tersebut putus, maka keseluruhan jaring itu tidak bisa berfungsi lagi, sampai simpul tersebut diperbaiki. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang yang membentuk jaring itu hanya dua saja,
- 5) media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan, dan
- 6) ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan mediana itu dipelihara dan dipertahankan.

Brunne *dalam* Parasmo dan Utami (2017) menyimpulkan bahwa jaringan sosial suatu pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang, paling sedikit kurang dari tiga orang, yang masing–masing mempunyai identitas yang tersendiri dan masing–masing dihubungkan antara satu dengan lainnya melalui hubungan sosial yang ada sehingga melalui hubungan tersebut mereka itu dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial. Jaringan sosial dibedakan jaringan formal dan informal, yang diawali dari keanggotaan resmi (misalnya dalam asosiasi), dan yang terakhir adalah membangun saling simpati (misalnya: persahabatan). Disamping itu, jaringan dapat disusun secara horizontal dan vertikal. Jaringan horizontal mempertemukan orang dari status dan kekuasaan yang sama, dan jaringan vertikal merupakan gabungan dari individu yang berbeda dan berada dalam hubungan yang tidak simetris dalam hirarki dan ketergantungan, seperti yang diutarakan oleh Dwiningrum (2014).

3. Tingkat Keberdayaan

Menurut Ife *dalam* Yuliza (2019), pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kehidupan masa depannya dengan memberikan sumber daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan. Suharto (2008) secara konseptual mengungkapkan bahwa pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘*power*’ yang berartikan kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) yang dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat namun juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. Pemberdayaan juga dimaksudkan agar dapat menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang serta jasa yang diperlukan. Pemberdayaan menjadikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Suharto (2008) mengemukakan bahwa gerakan pemberdayaan mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada *the powerless* agar semua dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar dari proses aktualisasi eksistensi. Adi dalam Setiawati (2019) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Berdasarkan pendapat tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju keberdayaan atau proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Terdapat dua prinsip dasar yang seyogyanya dianut dalam proses pemberdayaan. Pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri sesuai dengan cara yang dipilihnya sendiri. Kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta (Syahyuti, 2007).

Ife dalam Yuliza (2019) mengemukakan bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat.

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat di antaranya menyangkut derajat keberdayaan (Suharto, 2008), yakni tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*), tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*), tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*),

tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas (*power with*). Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan (Friedman *dalam* Mertens, 2013), yakni pengembangan berbasis masyarakat, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, pengembangan modal sosial masyarakat, dan penghapusan ketimpangan *gender*.

Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan membutuhkan *facilitating factors*, yakni kelompok masyarakat yang dinamis (*group dynamics*) dan pendamping/fasilitator yang kompeten. Meskipun *facilitating factors* tidak diverifikasi secara empiris, tetapi perlu dikemukakan agar sifat dasar dari setiap program pemberdayaan masyarakat senantiasa membutuhkan pihak luar (fasilitator) dan kedinamisan kelompok sosial yang dapat ditonjolkan

Schuler *dalam* Muhammad Jaya dkk (2017) mengungkapkan bahwa konsep keberdayaan ditekankan pada tingkat mobilitas dimana keberdayaan dilihat dari kebebasan dalam mengambil keputusan dan peluang untuk ikut dalam kegiatan politik. Konsep Malhotra dkk *dalam* Yuliza (2019) menyatakan keberdayaan diukur dari segi ekonomi, sosial budaya, keluarga, hukum, politik, dan psikologis. Utama (2010) mengukur keberdayaan diantaranya adalah kapasitas mengambil tindakan dan kemampuan kolektif. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberdayaan diantaranya kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan akses pasar.

a. Akses Informasi Pertanian

Menurut Solikhatusun (2010) dalam hasil pengkajiannya bahwa akses informasi mempengaruhi masyarakat dimana hal ini didukung oleh pendapat Mardikanto (2009) yang menyatakan bahwa golongan masyarakat atau individu yang aktif mencari informasi dan ide-ide baru biasanya lebih inovatif dibandingkan dengan orang-orang pasif apalagi yang selalu skeptis terhadap hal baru. Petani yang sering mengakses informasi dari berbagai media akan menambah pengetahuan dan wawasannya terkait dengan materi apa yang diakses petani tersebut. Jadi secara tidak langsung hal ini berhubungan dengan bagaimana petani melakukan proses mempersepsikan sebuah stimulus baik berupa informasi maupun inovasi yang diterimanya. Oleh karena itu, hal ini dapat diartikan bahwa semakin sering atau aktif

seseorang dalam mengakses informasi maka seseorang akan lebih cepat dalam mempersepsikan objek persepsi karena luasnya pengetahuan dan wawasannya terhadap sebuah inovasi yang disampaikan. Dalam era informasi saat ini, petani dapat mengakses informasi melalui berbagai sarana komunikasi, seperti telepon rumah, telepon genggam, komputer, siaran radio/televisi, warung internet, perpustakaan desa maupun media cetak (Andriaty, 2012).

b. Organisasi Lokal

Masyarakat Indonesia betapapun mereka hidup sederhana, telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kebutuhan, menjangkau sumber dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mekanisme tersebut dilembagakan dalam sebuah wahana yang berupa organisasi, baik yang dilandasi oleh keagamaan, kesukuan maupun etnis yang mana menghasilkan nilai sosial budaya atau kearifan lokal sehingga menjiwai semua aktivitas masyarakat lokal tersebut. Oleh karena itu, jelas bahwasanya keberadaan organisasi yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah. Organisasi yang ada di masyarakat memperlihatkan ciri-ciri, seperti egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi bagi seluruh anggota, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta mengembangkan musyawarah. Ciri-ciri organisasi lokal ini telah mengakomodasi unsur hak asasi manusia dan demokratisasi pada tingkat lokal. Oleh sebab itu, apabila berbagai ciri yang melekat pada organisasi lokal ini dapat dipertahankan maka akan semakin kuat ketahanan sosial masyarakat dalam nuansa pluralism (Widodo dan Suradi, 2011).

Sehubungan dengan itu, organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal. Lebih jauh dari itu, berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh

Korten dan Sjahrir *dalam* Noor (2011) bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*) yang mana dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat.

c. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian merupakan salah satu sikap yang seyogyanya dimiliki setiap orang. Mandiri berarti kekuatan mengatur sendiri, tindakan mengarahkan sendiri, tidak tergantung pada kehendak orang lain, hal untuk mengikuti kemauan sendiri. Diri yang mandiri adalah diri yang berfungsi secara integratif memilih dan mengarahkan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Sebagai suatu sikap, mandiri merupakan suatu akumulasi dari pemahaman, penghayatan, dan keterampilan yang tidak bisa diperoleh melalui proses belajar mengajar pada umumnya. Ia memiliki karakter yang khas yang memerlukan proses yang mendalam dan intensif. Ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan perkapita, atau besar kecilnya utang, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya (Kartasmita *dalam* Jaya, 2017).

Penggunaan istilah “ekonomi” di masa sekarang memiliki beberapa makna. Pertama, istilah ekonomi kadang digunakan untuk merujuk pada cara melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata “*economically*” (bertindak secara hemat) yang berarti efisiensi, pengerahan upaya minimal (dengan hasil maksimal), dan adanya adaptasi terhadap cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kedua, istilah “ekonomi” kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan (misalnya dalam produksi). Makna ini sering kali disampaikan dengan istilah “*provisioning*”, yaitu pengadaan barang dan jasa. Ketiga, istilah “ekonomi” adalah merujuk pada institusi-institusi dalam pasar adalah perwujudan yang paling menyolok dari upaya pencapaian efisiensi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kita (Caporaso dan Levine, 2008).

Melihat definisi kemandirian dan ekonomi, dapat menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi adalah suatu sikap dimana orang dapat mengatur, memenuhi, dan tidak tergantung pada kehendak orang lain dalam kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya (Santoso, 2009).

d. Sikap Kritis

Menurut Rhodes *dalam* Colley dkk (2012) bahwa “*Critical thinking is a habit of mind characterized by the comprehensive exploration of issues, ideas, artifacts, and events before accepting or formulating an opinion or conclusion*” yang artinya berpikir kritis adalah kebiasaan pikiran ditandai dengan eksplorasi komprehensif masalah, ide-ide, artefak, dan peristiwa sebelum menerima atau merumuskan pendapat atau kesimpulan.

Halpern *dalam* Colley dkk (2012) menyatakan berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan dan mengacu langsung kepada sasaran merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Berpikir kritis juga biasa disebut *directed thinking* sebab langsung kepada fokus yang akan dituju.

Nickerson *dalam* Colley dkk (2012) seorang ahli dalam berpikir kritis menyampaikan ciri-ciri orang yang berpikir kritis dalam hal pengetahuan, kemampuan, sikap dan kebiasaan dalam bertindak adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan fakta-fakta secara mahir dan jujur.
- 2) Mengorganisasi pikiran dan mengaktualisasikannya dengan jelas, logis atau masuk akal.
- 3) Membedakan antara kesimpulan yang didasarkan pada logika yang valid dengan logika yang tidak valid.
- 4) Mengidentifikasi kecukupan data.
- 5) Memahami perbedaan antar penalaran dan rasionalisasi.

- 6) Mencoba untuk mengantisipasi kemungkinan konsekuensi dari berbagai kegiatan.
- 7) Memahami ide sesuai dengan tingkat keyakinannya.
- 8) Melihat similaritas dan analogi secara tidak dangkal.
- 9) Dapat belajar secara independen dan mempunyai perhatian yang tak kunjung hilang dalam bekerjanya.
- 10) Menerapkan teknik *problem solving* dalam domain lain dari yang sudah dipelajarinya.
- 11) Dapat menyusun representasi masalah secara informal ke dalam cara formal.
- 12) Dapat menyatakan suatu argument verbal yang tidak relevan dan mengungkapkan argumen yang esensial.
- 13) Mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan.
- 14) Sensitif terhadap validitas dan intensitas dari suatu kepercayaan dengan validitas dan intensitas yang dipegangnya.
- 15) Menyadari bahwa fakta dan pengalaman seseorang selalu terbatas, banyak fakta yang harus dijelaskan dengan sikap *non inquiri*.
- 16) Mengenali kemungkinan keliru dari suatu pendapat, kemungkinan bias dalam pendapat, dan mengenali bahaya dari pembobotan fakta menurut pilihan pribadi.

4. Program KKSR (Kebun Kelapa Sawit Rakyat)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melakukan upaya pembangunan sektor riil melalui pengembangan sektor perkebunan salah satunya melalui program Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang selanjutnya dikenal sebagai program KKSR. Program KKSR adalah salah satu upaya mensinergikan tiga pilar pembangunan, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan. Program KKSR ini diterapkan setelah menilai beberapa faktor pendukung, yakni adanya potensi lahan untuk pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Bangka, besarnya keinginan masyarakat untuk membudidayakan

kelapa sawit, serta untuk mengikis kesenjangan ekonomi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat.

Adapun tujuan pembangunan program KKSR adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pembangunan perkebunan.
- b. Meningkatkan usaha pembangunan perkebunan kelapa sawit antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.
- c. Meningkatkan penguasaan ekonomi daerah dengan mengikursertakan masyarakat dan pengusaha lokal.
- d. Mendukung pengembangan wilayah.
- e. Pemberdayaan masyarakat menjadi petani yang maju dan mandiri.

Dengan berjalannya program ini diharapkan tujuan yang diinginkan dapat tercapai mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam pembinaan masyarakat perdesaan yang mana seringkali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Maka dari itu, kegiatan pemberdayaan terutama pemberdayaan petani perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dalam mutu taraf penghidupan yang lebih layak. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan pembinaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015 Nomor: 2.01.2.02.01.19.47.5.2 tanggal 1 April 2015.
- b. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2534/DINHUTBUN /2015 tentang Penerapan Kelompok Tani Peserta Program Pembangunan Kelapa Sawit Rakyat.

Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat ini sendiri diperuntukkan petani yang berdomisili di Kabupaten Bangka yang memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk membangun kebun kelapa sawit. Adapun persyaratan petani peserta Program KKSR antara lain:

- a. Merupakan penduduk setempat atau berdomisili di Kabupaten Bangka.
- b. Berusia 21 tahun atau lebih dan sudah menikah.
- c. Petani tergabung dalam satu kelompok tani.

- d. Terdaftar dalam daftar normatif yang ditetapkan oleh bupati.
- e. Memiliki lahan minimum 2 Ha dan tidak bermasalah atau diokupasi oleh pihak lain dengan menunjukkan bukti berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan setempat.
- f. Lahan petani di luar kawasan hutan.
- g. Memiliki dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan.

Program pemberdayaan petani kelapa sawit atau yang dikenal Program KKSR ini merupakan program pemberdayaan melalui kemitraan yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan petani. Adapun peran masing-masing pihak yang bermitra ini, yakni:

- a. Petani, sebagai penyedia lahan dan tenaga untuk membangun kebun awal yakni meliputi pembukaan lahan sampai dengan tanaman menghasilkan.
- b. Perusahaan (swasta), sebagai penyedia input berupa bibit unggul bersertifikat dan sebagai mentor yang membina teknis lapangan dan manajemen kebun serta memasarkan hasil produksi berupa tandan buah segar (TBS). Perusahaan yang dijadikan sebagai mitra merupakan perusahaan yang dipandang cukup berpengalaman dibidang perkebunan kelapa sawit khususnya dalam segi teknis, pemasaran, dan pengolahan hasil perkebunan serta dalam pengembangan plasma.
- c. Pemerintah, sebagai pihak yang merancang dan membuat Program KKSR sehingga berperan sebagai pihak yang membuat dan mengeluarkan peraturan antara pemerintah, perusahaan, perbankan, dan petani melalui suatu kesepakatan. Pemerintah memberikan bantuan pinjaman langsung ke setiap peserta kelompok tani untuk biaya pembukaan lahan dan pembelian sarana produksi, namun bantuan dana ini akan diangsur petani melalui pemotongan hasil panen kelapa sawit sebesar 30% dari panen petani tersebut lalu dari potongan 30% tersebut sebesar 70% untuk pemerintah dan 30% untuk perusahaan. Pemotongan

hasil panen ini akan dilakukan jika panen sawit sudah memenuhi standar buah yang berkualitas.

B. Hasil Pengkajian Terdahulu

Adapun pengkajian-pengkajian terdahulu yang menjadi landasan dalam pengkajian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pengkajian Terdahulu

| No. | Judul | Pengarang | Variabel | Hasil Pengkajian |
|-----|---|---|--|--|
| 1. | Peran Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Petani Karet di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar | Agus Apriansah, Eri Sayamar, dan Roza Yulida (2016) | Variabel X : <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepercayaan (X₁) • Norma-norma sosial (X₂) • Jaringan sosial (X₃) Variabel Y : <ul style="list-style-type: none"> • Strategi adaptasi dan pertahanan (Y₁) • Pengembangan kapasitas individu (Y₂) • Perluasan jaringan sosial (Y₃) • Mempererat hubungan kerja sama (Y₄) • Peningkatan kepercayaan terhadap <i>stakeholders</i> (Y₅) • Membangun kepedulian sosial (Y₆) | 1) Hubungan modal sosial terhadap keberdayaan petani karet di Desa Kuntu secara keseluruhan dapat dikategorikan tinggi. 2) Adapun peran modal sosial terhadap keberdayaan petani di Desa Kuntu secara keseluruhan dikategorikan berperan. 3) Hubungan peran modal sosial dengan unsur-unsur modal sosial terhadap keberdayaan petani karet secara keseluruhan memiliki hubungan yang cukup kuat. |

Lanjutan Tabel 1.

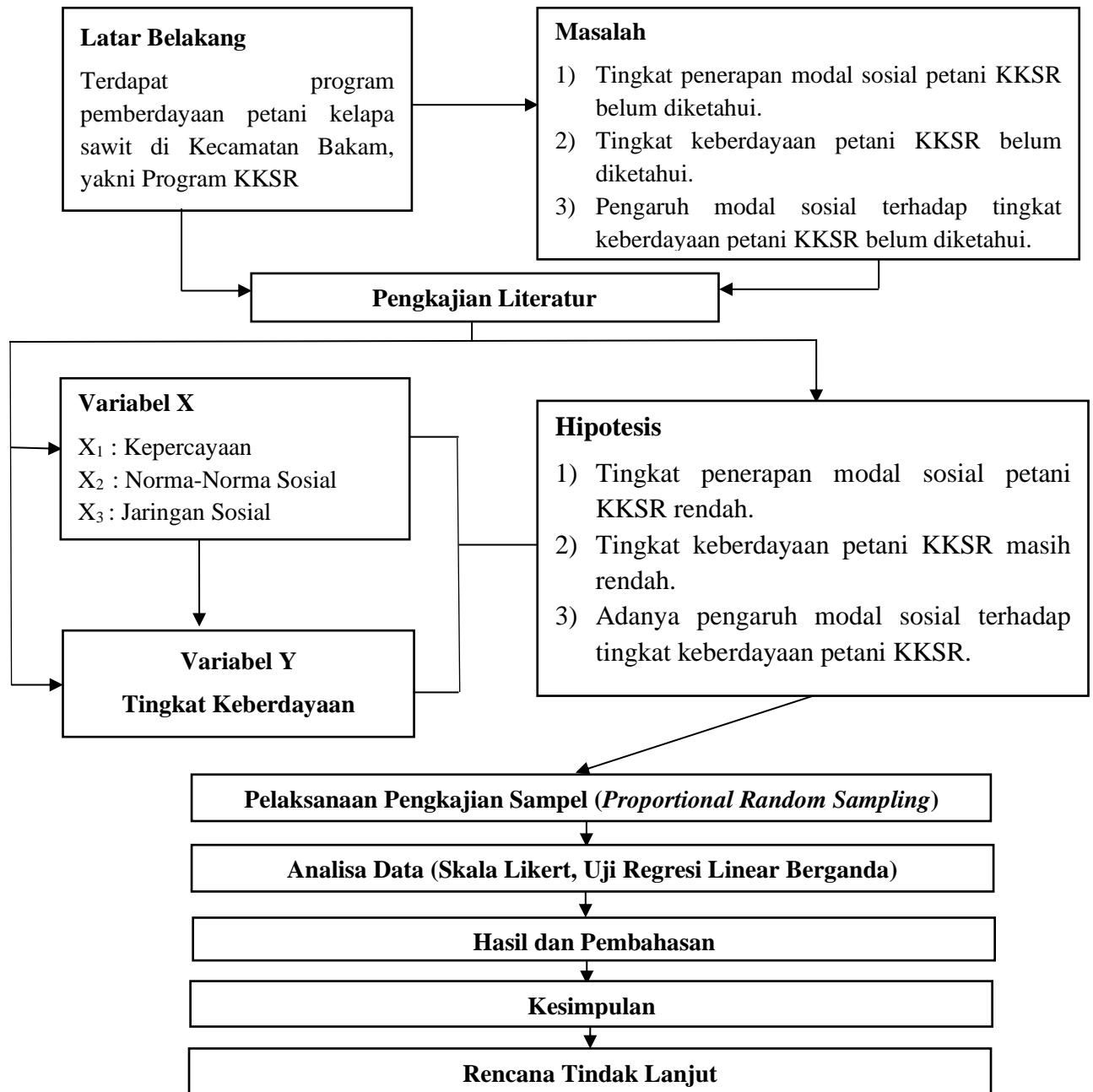
| No. | Judul | Pengarang | Variabel | Hasil Pengkajian |
|-----|---|--|--|---|
| 2. | Tingkat Keberdayaan Kelompok Tani pada Pengelolaan Usahatani Padi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah | Muhammad Jaya, Sarwititi Sarwoprasodjo, Musa Hubeis, dan Basita Ginting Sugihen (2017) | Variabel X : <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi pembangunan partisipatif (X₁) • Modal sosial (X₂) Variabel Y : <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mengelola informasi pertanian (Y₁) • Kemampuan mengambil keputusan bersama (Y₂) • Kemampuan manajemen usahatani (Y₃) • Kemampuan memasarkan hasil usaha (Y₄) • Kemampuan penerapan teknologi inovasi (Y₅) | 1) Tingkat keberdayaan petani dipengaruhi oleh komunikasi 2) Tingkat keberdayaan kelompok tani di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo secara keseluruhan berada pada kategori rendah. |
| 3. | Analisis Hubungan Modal Sosial dan Tingkat Keberdayaan Petani Kelapa Sawit di Desa Sukamaju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar | Ani Lisnawati, Eri Sayamar, dan Kausar (2015) | Variabel X : <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam jaringan sosial (X₁) • Kepercayaan (X₂) • Norma-norma sosial (X₃) Variabel Y : <ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas informasi (Y₁) • Keterlibatan atau partisipasi petani (Y₂) • Akuntabilitas petani (Y₃) • Kapasitas organisasi lokal petani (Y₄) | 1) Modal sosial (X) petani kelapa sawit di Desa Sukamaju Kecamatan Tapung Hilir berada pada kategori tinggi. 2) Tingkat keberdayaan (Y) petani kelapa sawit di Desa Sukamaju Kecamatan Tapung Hilir berada pada kategori tinggi. 3) Modal sosial mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberdayaan petani kelapa sawit di Desa Sukamaju Kecamatan Tapung Hilir. |

Lanjutan Tabel 1.

| No. | Judul | Pengarang | Variabel | Hasil Pengkajian |
|-----|--|---|---|--|
| 4. | Model Tingkat Keberdayaan Petani pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Tani Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor | Idha Farida dan Pepi Rospina Pertiwi (2014) | Variabel X : • Karakteristik Individu (X_1) • Karakteristik Kelompok (X_2) • Dinamika Kelompok (X_3) • Kualitas Penyuluhan (X_4) Variabel Y : • Perilaku Petani (Y_1) • Tingkat Keberdayaan Gapoktan (Y_2) | 1) Karakteristik individu tidak berpengaruh terhadap perilaku anggota Gapoktan Rukun Tani. 2) Karakteristik gapoktan berpengaruh signifikan terhadap perilaku anggota Gapoktan Rukun Tani. 3) Dinamika Kelompok berpengaruh signifikan terhadap perilaku anggota Gapoktan Rukun Tani. 4) Kualitas penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap perilaku anggota Gapoktan Rukun Tani. 5) Perilaku anggota gapoktan berpengaruh signifikan terhadap tingkat keberdayaan Gapoktan Rukun Tani. |

C. Kerangka Pikir

Penyusunan kerangka pikir pengkajian ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengarahannya. Adapun garis lurus yang menghubungkan kotak-kotak variabel menunjukkan hubungan timbal balik sedangkan garis panah menunjukkan pengaruh atau saling mempengaruhi. Kerangka pemikiran peran modal sosial terhadap tingkat keberdayaan petani Program KKSR di Kecamatan Bakam ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



Keterangan:

— : Berhubungan

—> : Mempengaruhi

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengkajian Tugas Akhir

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari pengkajian ini, maka adapun hipotesis pengkajian ini antara lain:

1. Tingkat penerapan modal sosial petani Program KKSR (Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Bakam rendah.
2. Tingkat keberdayaan petani Program KKSR (Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Bakam rendah.
3. Adanya pengaruh modal sosial terhadap tingkat keberdayaan petani Program KKSR (Kebun Kelapa Sawit Rakyat) di Kecamatan Bakam.